



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id dan pusbindiklatren@bappenas.go.id

Nomor : 528/P.01/04/2017

27 April 2017

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Perihal : **Pemanggilan Calon Peserta Program
S2 Dalam Negeri Tahun 2017 di Universitas Indonesia**

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;
2. Kepala BKD/Biro Kepegawaian/SDM Provinsi/Kabupaten/Kota.
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi dan penempatan untuk program S2 Dalam Negeri tahun 2017, dengan ini kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Staf Saudara (terlampir) telah terseleksi menjadi calon peserta Program S2 Dalam Negeri tahun 2017 yang dilaksanakan di 20 (dua puluh) program studi pada 11 (sebelas) perguruan tinggi di Indonesia.
2. Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi, seluruh calon peserta diwajibkan:
 - a) Menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi 5 (lima) surat sesuai format terlampir, yang terdiri dari Surat Tugas, Surat Pernyataan, Surat Perjanjian, Surat Penempatan Kembali dan Surat *Cost Sharing* serta mengunggah/*upload* dalam *website* Pusbindiklatren Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan;
 - b) Mengunggah/*upload* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP dalam *website* Pusbindiklatren Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan.
3. Seluruh kelengkapan administrasi dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan perincian 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan cap basah. Kelengkapan administrasi tersebut dikirimkan kepada Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Diklat Gelar) dengan alamat Jalan Proklamasi No 70, Jakarta Pusat 10320, **paling lambat tanggal 1 Juni 2017**.
4. Seluruh calon peserta diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bersedia menerima sanksi apabila Pusbindiklatren dan/atau Program Studi menemukan informasi yang berbeda mengenai: a) Status Kepegawaian seperti masa kerja dan pangkat/golongan ruang; dan b) Status pendidikan terakhir baik yang telah selesai maupun yang sedang dijalani, misalnya calon penerima beasiswa Pusbindiklatren sudah berpendidikan S2 atau sedang mengikuti program S2 di tempat lain;
 - b) Tidak mengambil cuti akademis dengan alasan apapun;
 - c) Mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan masing–masing Program Studi;
 - d) Memberikan konfirmasi kepada Pusbindiklatren apabila tidak bersedia mengikuti program studi yang ditandatangani serendah–rendahnya oleh Pejabat Eselon II sesuai dengan jadwal penempatan terlampir dan/atau tidak mendapatkan izin dari atasan.

- **Jika calon peserta mengundurkan diri SETELAH tanggal 5 Mei 2017, yang bersangkutan DIWAJIBKAN untuk mengganti biaya seleksi Pusbindiklatren Bappenas.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan informasi ini kepada calon peserta yang tercantum dalam lampiran dan membantu proses pengurusan administrasi yang diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
Dan Pelatihan Perencana



Nur Hygiawati Rahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga (terlampir);
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (terlampir);
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Unit Kerja Calon Peserta Program Beasiswa;
6. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas.

Lampiran 1 Surat Nomor : 528/P.01/04/2017
Tanggal : 27 April 2017

Yth.

- 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- 2 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Kementerian Ketenagakerjaan
- 5 Kementerian Koperasi dan UMKM
- 6 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 7 Kementerian Perdagangan
- 8 Kementerian Perindustrian
- 9 Kementerian Pertanian
- 10 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 11 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
- 12 Pemerintah Kabupaten Malinau
- 13 Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- 14 Pemerintah Kota Bekasi
- 15 Pemerintah Kota Bukittinggi
- 16 Pemerintah Kota Manado
- 17 Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- 18 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Lampiran 1 Surat Nomor : 528/P.01/04/2017
Tanggal : 27 April 2017

**DAFTAR KARYASISWA PROGRAM S2 DALAM NEGERI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI, UNIVERSITAS INDONESIA
BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2017**

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
1	ADISTI PRIDANANTI,SE	198010162008012016	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	DIT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN	-	DKI
2	ANASTASIA WIDYA KRISTIANI, ST	198802162010122003	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	DIREKTORAT PERENCANAAN TATA RUANG	Kota Jakarta Selatan	DKI
3	Ayusia Rahajeng Pradesy	198606062009122003	Kementerian Koperasi dan UMKM	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran	Kota Jakarta Selatan	DKI
4	Christiana Ari Sabatina, ST	198501272009122001	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Dit. Perencanaan Tata Ruang, Ditjen Tata Ruang	Kota Jakarta Selatan	DKI
5	DEDY PRATAMA, SE	198610032009121001	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)	Kota Jakarta Selatan	DKI
6	Eka Julianti	199007202014022001	Kementerian Perdagangan	Direktorat Tertib Niaga	Kota Jakarta Pusat	DKI
7	erni suryaningrum	198805012014032003	Kementerian Koperasi dan UMKM	Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha	Kota Jakarta Selatan	DKI
8	EVITA AYU KOMALADEWI SUYOTO, ST	198709052010122007	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR	Kota Jakarta Selatan	DKI
9	MIA ADHI PARAMITHA, SE., Ak.,	198401272010122001	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	SUBDIT. TATA KELOLA DAN EVALUASI SERTIFIKASI	Kota Jakarta Selatan	DKI
10	Nisa Ulkaromah, S.E	199001252014032001	Kementerian Ketenagakerjaan	Biro Perencanaan	Kota Jakarta Selatan	DKI
11	Noor Fauziah Isnaeni	198601062008122001	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang	Kota Jakarta Selatan	DKI
12	Nurjatlina, S.P.	198311182011062006	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat	Kota Jakarta Selatan	DKI
13	Poltak Pramah Utama Harahap	198412202015021001	Kementerian Perdagangan	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	Kota Jakarta Pusat	DKI
14	Roydatul Zikria	198702272009122006	Kementerian Pertanian	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian		DKI
15	SIRMA OKTAVIANI, ST	198310072010122003	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kimia Hulu	Kota Jakarta Selatan	DKI

Lampiran 1 Surat Nomor : 528/P.01/04/2017
Tanggal : 27 April 2017

**DAFTAR KARYASISWA PROGRAM S2 DALAM NEGERI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK, UNIVERSITAS INDONESIA
BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2017**

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	PROV
1	abrar gaffari	198310132011011002	Pemerintah Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	SUMBAR
2	Anastasia Citra Puspita, SE.	198505282010122001	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dir. Pengemb. Strategi&Kebijakan Pengadaan Khusus	DKI
3	Andi Dian Anggreani,SKM	198206072008032001	Pemerintah Kabupaten Malinau	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	KALTARA
4	Ariesto Andrew Agoes P. SE	198510292010011003	Pemerintah Kota Manado	BAPPEDA	SULUT
5	ARIF PRABAWA WIDIATMA, S.Si	198105102008011020	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	DIREKTORAT KESTUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI	DKI
6	Betty Yarsita Agustina	198308062009012004	Kementerian Perindustrian	Biro Hubungan Masyarakat	DKI
7	Citra Fatimah Nur	198906012014032002	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	BADAN PENANAMAN MODAL	JATIM
8	Dina Mardiyanti	198003072011012003	Pemerintah Kota Bekasi	Disperindagkop Kota Bekasi	JABAR
9	EVIE KOMALASARI	198510242008122001	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BPJ TOL	DKI
10	FEIRA KISWATININGRUM, S.Pt	198002232010012004	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	BANTEN
11	INDAH PRABAWATI UTAMI, S.Si	198802242014022005	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	BALAI TAMAN NASIONAL SIBERUT	SUMBAR
12	LADY IVONE, S.SOS	198407172010122005	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN	DKI
13	Lydia Gandini Triastuty, SPt.	198503302011012014	Kementerian Koperasi dan UMKM	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran	DKI
14	MARWAN SURACHMAN PUTRA	198404072009121004	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah	DKI
15	RANI NURHAERATI RIYANTO PUTRI, S.E	198602162012122002	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA	SULSEL
16	RISMUTIA HAYU DESWATI,SE	198512212009122002	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PUSAT RISET PERIKANAN	DKI
17	RITA ERMIZA M, SH	198604122010012014	Pemerintah Kota Bukittinggi	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	SUMBAR
18	SHINTA CITRA LESTARI, S.Si	198201192009022001	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Biro Pemerintahan dan Kerjasama	JABAR
19	Syarifah Hijriah, S.Pi	198210222008022002	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	GORONTALO
20	YOLANIA SARI	198507042014022002	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Inspektorat Jenderal	DKI
21	Yuda Prawira, S.IP	199101152012061002	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Sekretariat Daerah	JABAR

JADWAL PENEMPATAN S2 DALAM NEGERI TAHUN 2017

NO	KETENTUAN	PELAKSANAAN
1	Serah terima peserta Dalam Negeri (H)	27 April 2017
2	Batas akhir pemanggilan peserta (H + 7)	4 Mei 2017
4	Batas akhir pengunduran diri (Menyesuaikan Jadwal SIMAK UI)	5 Mei 2017
5	Pemberitahuan/konfirmasi dari Prodi (H + 21)	18 Mei 2017
6	Konfirmasi daftar peserta final (H + 28)	25 Mei 2017
7	Kelengkapan persyaratan 5 dokumen/formulir + kalender akademik + SK Rektor untuk SPP (H + 35)	1 Juni 2017
8	Kelengkapan dokumen NOTA PERSETUJUAN dan Surat Keberangkatan + NPWP + Copy buku rekening bank (H + 42)	8 Juni 2017

Catatan :

- Peserta yang mengundurkan diri melewati batas akhir **DIWAJIBKAN** untuk mengganti biaya seleksi.

**SURAT PERJANJIAN
BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS**

Berdasarkan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor: tanggal, perihal:, bahwa saya telah diterima di dan direncanakan mulai kuliah pada bulan, 2017. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan/Pekerjaan :
Lembaga :
Alamat :

Menerangkan dengan sungguh–sungguh atas kehendak sendiri dan semata–mata untuk mendapat pendidikan dan pelatihan program gelar dengan menerima syarat–syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban–kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Saya menyatakan dan berjanji :

1. Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi penerima beasiswa Pusbindiklatren;
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai pegawai tugas belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Akan mengikuti perkuliahan tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
4. Akan selalu memberikan informasi perkembangan studi dan juga *upload* segala kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk lapor diri melalui aplikasi E-Monev;
5. Bersedia mengisi kuesioner dan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Pusbindiklatren Bappenas selama dan setelah penyelenggaraan diklat gelar;
6. Bersedia menerima sanksi apapun dari Pusbindiklatren jika: a) Dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat ditemukan ketidaksesuaian data yang saya informasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana; serta b) Melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren maupun oleh program studi;
7. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri selama sekurang–kurangnya 2 kali masa studi saya (2n tahun);
8. Akan mengembalikan seluruh biaya yang ditentukan oleh Pusbindiklatren kepada Kas Negara, jika: a) Terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya; b) Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; atau c) Mengundurkan diri dari instansi kerja saya sebelum masa 2n terpenuhi;
9. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana beasiswa termasuk namun tidak terbatas pada biaya seleksi, *tuition fee*, dan *living allowance*, bila telah dibayarkan oleh Pusbindiklatren;

Apabila saya merupakan karyasiswa program *linkage* dan reguler Jepang, saya juga berjanji:

10. Akan menanggung seluruh biaya pendidikan jika gagal berangkat ke Jepang dan belum bisa menyelesaikan perkuliahan reguler dalam negeri dalam kurun waktu maksimal 18 bulan;
11. Memberi informasi perkiraan kepulangan 3 (tiga) bulan sebelum masa studi berakhir, serta langsung melaporkan kepulangan dan status studi setelah kelulusan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal kepulangan.

Jika saya melanggar ketentuan–ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mengetahui,
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Nama Kota, , 2017
Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Materai 6000)

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

KOP SURAT KANTOR YBS

SURAT TUGAS BELAJAR NOMOR...../...../...../2017

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Dasar : Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Bappenas Nomor : tanggal, perihal :
.....,

Memberi Tugas:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : melaksanakan tugas belajar pada program S2 Dalam Negeri:
Perguruan Tinggi :
Tingkat :
Nama Program Studi :
Terhitung mulai :
Lama Studi :

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(nama kota),2017
Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah*

(Cap Basah)

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Pimpinan Unit Kerja Ybs.
3. Kepala Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas
4. PPK PPN X, Kementerian PPN/Bappenas

*Keterangan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau unit kerja eselon II yang bertanggung jawab mengeluarkan surat tugas;
2. Format dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi;
3. Format Surat Tugas sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 80 Tahun 2012.

KOP SURAT KANTOR YBS

SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini mengizinkan Saudara (.....) untuk mengikuti :

Program : Magister/Doktoral (Pilih Salah Satu)
Nama Program Studi :
Perguruan Tinggi :
Tahun Akademik :
Lama Studi :

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(nama kota),2017

Pejabat yang Memberikan Izin,
Atasan Langsung (Minimal Eselon II)

(Cap Basah dan Materai 6000)

(.....)
NIP.

SURAT KESEDIAAN *COST – SHARING*

KOP SURAT KANTOR YBS

Nomor : , (*tempat/tgl/bln/th*)
Lampiran : (berkas)
Hal : **Kesediaan Pembiayaan Diklat**
an.: 1. **Sdr/Sdri. X**
2. **Sdr/Sdri. Y**
3. **Sdr/Sdri. Z**

Kepada Yth.:

**Kepala Pusbindiklatren
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor : tanggal, perihal :, dengan ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr/Sdri. X, Y, Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA	ITEM MANDATORY	ITEM VOLUNTARY(Rp.)	JUMLAH(Rp.)
1	X			
2	Y			
3	Z			

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah/
Pimpinan Instansi Minimal Eselon II

(Cap Basah)

(.....)

NIP.

Tembusan Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
3. Penyelenggara Diklat (Program Studi);
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

Catatan:

- Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi **keajiban** instansi asal berupa:a) Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau program *linkage*);b) Uang saku.
Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela**aan ditanggung oleh instansi asal.

KOP SURAT
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM

SURAT PERNYATAAN
RENCANA PENEMPATAN KEMBALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

menyatakan mengizinkan Saudara (.....) untuk mengikuti :

Program : Magister/Doktoral (Pilih Salah Satu)
Nama Program Studi :
Perguruan Tinggi :
Tahun Akademik :
Lama Studi :

Selanjutnya, setelah yang bersangkutan menyelesaikan program tersebut diatas, akan ditempatkan pada unit perencanaan atau unit kerja yang sesuai dengan kompetensi dan atau bidang studi yang ditempuh oleh yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(nama kota),2017

,
Yang Menyatakan,
Kepala Badan Kepegawaian/Biro SDM

(Cap Basah dan Materai 6000)

(.....)

Tembusan:
Atasan langsung yang bersangkutan.